

LAPORAN PENELITIAN

**IMPLEMENTASI *E-GOVERNMENT*
DALAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
DI KABUPATEN BANYUMAS**

Oleh:

Anto Hidayat

Siti Aisyah

Sri Weningsih

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TERBUKA
2011**



**LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PENELITIAN BAHAN AJAR**

1. a. Judul Penelitian : Implementasi *E-Government* dalam Administrasi Pemerintahan di Kabupaten Banyumas
- b. Bidang Penelitian : Penelitian Pengayaan Bahan Ajar
2. Ketua Peneliti :
 - a. Nama : Anto Hidayat, S.IP, M.Si
 - b. NIP : NIP. 197507142001121001
 - c. Golongan Kepangkatan : Penata/IIIc
 - d. Jabatan Akademik dan Unit Kerja : Lektor, FISIP-UT
 - e. Program Studi : Ilmu Pemerintahan
3. Anggota Peneliti
 - a. Jumlah Anggota : 2 Orang
 - b. Anggota 1
Nama : Dra. Siti Aisyah, M.Si
Unit Kerja : FISIP-UT
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
 - c. Anggota 2
Nama : Dra. Sri Weningsih, M.Si
Unit Kerja : UPBJJ-UT Purwokerto
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
4. a. Periode Penelitian : 2011
- b. Lama Penelitian : 8 (delapan) bulan
5. Biaya Penelitian : Rp. 20.000.000,-
6. Sumber Biaya : LPPM-UT
7. Pemanfaatan Hasil Penelitian : Seminar, Pengayaan Bahan Ajar

Tangerang Selatan, Januari 2012

Mengetahui:
Dekan FISIP-UT,

Peneliti,

Daryono, SH, MA, Ph.D
NIP. 131866185

Anto Hidayat, S.IP, M.Si
NIP. 197507142001121001

Mengetahui:
Ketua LPPM

Menyetujui:
Kepala Pusat Keilmuan,

Drs. Agus Joko Purwanto, M.Si
NIP. 196605081992031003

Dra. Endang Nugraheni, M.Ed, M.Si
NIP. 195704221986052001

ABSTRACT

e-Government is a government program to develop the delivery of electronic-based governance and perform transformations in public administration. This study aims to describe and assess the implementation of e-Government in Banyumas, Central Java. Development of government administration by using e-Government applications represent an opportunity and challenge for the Government of Banyumas. The method used in this study is descriptive. The results indicate that web sites government of Banyumas at the stage of maturation. Application of management information systems have been actively used by the regional work units. Use of e-Government is not only limited to the site by government publications. Provision of public services to the level of full-service electronic delivery need to be pursued in stages. Increased commitment of regional leaders, the quality and quantity of human resources in ICT, infrastructure, technology, and the budget becomes an important factor for success in implementing e-Government by Government of Banyumas.

Keywords: e-Government, public administration, public service

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami berhasil menyelesaikan laporan penelitian bahan ajar yang berjudul “Implementasi *E-Government* dalam Administrasi Pemerintahan di Kabupaten Banyumas”. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan mengkaji implementasi *e-Government* dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Penelitian mengambil lokasi di Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Hasil dari penelitian ini dimaksudkan untuk memperkaya dan mendukung secara substantif revisi bahan ajar cetak IPEM4111 Pengantar Ilmu Pemerintahan pada Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-UT.

Dalam penyelesaian laporan ini, kami menyadari banyak sekali bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak baik secara moril maupun materiil sehingga laporan ini dapat diselesaikan. Kami pun menyadari substansi laporan ini masih jauh dari sempurna. Karena itu segala sumbang saran dan kritik yang ditujukan untuk perbaikan laporan ini akan penulis terima dengan tangan terbuka dan rasa terima kasih yang tulus. Akhir kata semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat baik bagi aspek akademis, maupun praktis keilmuan.

Tangerang Selatan, Januari 2012

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar Pengesahan	ii
Abstract	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	v
Daftar Tabel dan Gambar	vi
I. Pendahuluan	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah	3
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian	3
1.4. Kegunaan Penelitian	3
II. Tinjauan Pustaka	
2.1. Administrasi Pemerintahan	5
2.2. Konsep <i>E-Government</i>	6
2.3. Landasan Pengaturan <i>E-Government</i>	9
2.4. Elemen Pengembangan <i>E-Government</i>	10
III. Metode Penelitian	
3.1. Rancangan Penelitian	13
3.2. Unit Analisa dan Responden Penelitian	13
3.3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	13
3.4. Metode Analisis Data	15
IV. Hasil dan Pembahasan	
4.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah	16
4.2. Tingkat Penerapan <i>e-Government</i> Pemerintah Kabupaten Banyumas	19
4.3. Kepemimpinan	23
4.4. Kelembagaan	26
4.5. Sumber Daya Manusia	28
4.6. Infrastruktur dan Sistem Aplikasi	31
4.7. Alokasi Anggaran	36
V. Kesimpulan dan Saran	40
Daftar Pustaka	42
Lampiran	

DAFTAR TABEL & GAMBAR

Tabel 4.1. Data-data yang dipublikasikan di Dinhubkominfo Pemkab Banyumas	21
Tabel 4.2. Ketersediaan SDM TI di Instansi Pemerintah	28
Tabel 4.3. Keahlian yang Dibutuhkan dalam Kesiapan <i>e-Government</i>	30
Tabel 4.4. Komputer Ditiap Instansi Kabupaten Banyumas	31
Tabel 4.5. Komputer Server dan Peralatan Pendukung Yang Dimiliki Dinhubkominfo Kabupaten Banyumas	32
Tabel 4.6. Daftar Penyelenggara Jasa Telekomunikasi dan Daftar Produk Beroperasi di Kabupaten Banyumas Tahun 2008	33
Tabel 4.7. Data <i>Software</i> di Pemerintah Kabupaten Banyumas	34
Tabel 4.8. Rekapitulasi APBD Bidang Administrasi Umum Pemerintahan	37
Tabel 4.9. Rincian Anggaran Pembangunan di Dinhubkominfo Kabupaten Banyumas	38
Gambar 2.1. Interaksi Komponen dalam <i>E- Government</i>	7
Gambar 3.1. Wilayah Kabupaten Banyumas	16
Gambar 4.1. Situs web resmi Pemkab Banyumas	20
Gambar 4.2. Struktur Organisasi Dinhubkominfo Kab. Banyumas	26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pergeseran dari *traditional government* menjadi *electronic government* (*e-Government*) menjadi salah satu isu penting dalam transformasi administrasi pemerintahan saat ini. Dalam era demokrasi, pemerintah dihadapkan pada tuntutan masyarakat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, transparansi, akuntabel, serta lebih efektif dan efisien. Tuntutan masyarakat telah mendorong pemanfaatan *e-Government* atau pemerintahan berbasis elektronik dalam mendukung administrasi pemerintahan. Pemerintah tradisional (*traditional government*) yang identik dengan *paper-based administration* secara perlahan mulai ditinggalkan.

e-Government sebagai aplikasi teknologi komunikasi dan informasi dalam institusi publik mulai diperkenalkan menjelang akhir Abad 20, persisnya pada dekade akhir 1990-an, terutama di negara-negara industri maju yang tergabung dalam *Organization for Economic Cooperation and Development* (*OECD*). Penggunaan teknologi pada lembaga pemerintahan merupakan upaya untuk merevitalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi administrasi pemerintahan dalam pengelolaan kebijakan atau pun dalam pemberian pelayanan sebagai respons atas perubahan lingkungan strategis yang menuntut adanya administrasi pemerintahan yang efektif dan efisien. Kemajuan aplikasi dalam pemerintahan tidak terlepas dari perkembangan teknologi informasi yang secara imperatif telah menghilangkan batas-batas negara dan peradaban bangsa.

Perubahan paradigma pemerintahan di atas pada gilirannya mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah. Di era otonomi daerah saat ini, hampir semua pemerintah daerah telah memiliki situs web resmi. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyumas adalah salah satu daerah yang berupaya mengembangkan *e-Government* dalam sistem administrasi pemerintahan. Pemkab Banyumas yang telah merintis pembuatan situs internet sejak tahun 2002. Hal ini ditandai dengan tersedianya situs web resmi Pemkab Banyumas dengan alamat www.banyumaskab.go.id. Di samping itu, Pemkab Banyumas berupaya mengalokasikan anggaran untuk program komputerisasi dan

pengembangan sistem jaringan sebagai langkah digitalisasi administrasi pemerintahan.

Penerapan *e-Government* ini sejalan dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, yaitu menuju pemerintahan yang efektif dan efisien. *e-Government* merupakan upaya membentuk pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan masyarakat secara efektif. Sistem manajemen pemerintah yang selama ini merupakan sistem hierarki kewenangan dan komando sektoral yang mengerucut dan panjang, harus dikembangkan menjadi sistem manajemen organisasi jaringan yang dapat memperpendek lini pengambilan keputusan serta memperluas rentang kendali.

Globalisasi yang menyentuh berbagai bidang kehidupan menuntut pembaharuan dalam sistem administrasi pemerintahan. Pendayagunaan dalam sistem dan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang memungkinkan kegiatan perekonomian berlangsung lebih berkualitas dan efisien. Disadari bahwa kunci keberhasilan pembangunan perekonomian adalah daya saing, dan kata kunci daya saing adalah efisiensi proses pelayanan serta mutu, ketepatan dan kepastian kebijakan. Pengelolaan pelayanan dan kebijakan secara prima akan meningkatkan daya tarik investasi, wisata, arus perdagangan, dan sektor-sektor unggulan lainnya bagi daerah.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tidak dipungkiri daya gunanya, namun demikian *e-Government* dalam administrasi pemerintahan daerah bukan semata-mata perkembangan yang dilihat dari perspektif lingkungan strategis, yang lebih penting adalah dirasakannya adanya kebutuhan penerapan teknologi informasi dan komunikasi guna mencapai kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pelaksanaan *e-Government* tidaklah semudah yang diperkirakan, banyak hambatan yang dihadapi di dalam implementasinya, khususnya di pemerintahan daerah.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar Pemda yang telah mengaplikasikan *e-Government* baru pada tahap publikasi situs oleh pemerintah atau baru pada tahap pemberian informasi dan transaksi elektronik secara terbatas. Padahal yang perlu digarisbawahi bahwa *e-Government* bukan hanya sekedar publikasi situs oleh pemerintah melainkan pemberian pelayanan publik sampai

pada tingkat *full-electronic delivery service*. Penelitian ini bermaksud mendeskripsikan implementasi *e-Government* dengan mengambil lokasi penelitian di Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah.

1.2. Perumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang tersebut di atas, penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan pokok berikut ini:

- 1) Bagaimana kondisi *e-Government* di Kabupaten Banyumas dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan?
- 2) Bagaimana tingkat penerapan *e-Government* di Kabupaten Banyumas?
- 3) Langkah-langkah apakah yang diperlukan untuk memperbaiki kondisi *e-Government* di Kabupaten Banyumas?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah melakukan studi terhadap pemanfaatan *e-Government* dalam administrasi pemerintahan di Kabupaten Banyumas.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

- 1) Mendeskripsikan kondisi *e-Government* dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan di Kabupaten Banyumas.
- 2) Mengidentifikasi tingkat penerapan *e-Government* di Kabupaten Banyumas.
- 3) Merekomendasikan langkah-langkah bagi Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk memperbaiki kondisi *e-Government*.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Bagi Aspek Pengembangan Ilmu

Hasil dari penelitian ini dapat menambah wacana keilmuan yang berkaitan dengan implementasi kebijakan, khususnya mengenai implementasi *e-Government* dalam administrasi pemerintahan.

1.4.2. Bagi Aspek Praktis

- 1) Diketuainya kondisi *e-Government* di Kabupaten Banyumas dibandingkan dengan kondisi idealnya. Dengan demikian akan tergambar kekuatan dan kelemahan yang ada dalam proses implementasi *e-Government* di Kabupaten Banyumas saat ini.
- 2) Teridentifikasinya faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan *e-Government* di Kabupaten Banyumas. Sejumlah rekomendasi dapat disampaikan ke Pemkab Banyumas untuk memperbaiki kondisi *e-Government* dalam rangka mendorong administrasi pemerintahan yang efektif dan efisien.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Administrasi Pemerintahan

Administrasi pemerintahan dapat diartikan sebagai segala kegiatan atau proses untuk mencapai tujuan pemerintahan yang telah ditentukan, yaitu kegiatan yang dilakukan dalam suatu negara dari tingkat pemerintahan yang terendah sampai yang tertinggi dalam suatu negara. Dalam pandangan Ndraha (2003), konsep layanan dan pelayanan itulah konsep ilmu administrasi yang paling hakiki. Pada konsep inilah kedua ilmu bersentuhan, yaitu pada saat *pelayanan* itu menjadi *roh pemerintahan*.

Menurut Djaenuri (1998: 15) pelayanan publik mencakup hal-hal yang bersifat *regulatory* atau *law enforcement* dan pelayanan yang sifatnya penyediaan, atau penyediaan pelayanan atas dasar tuntutan atau permintaan masyarakat (*demand driven service*). Dengan lebih rinci Nurcholis (2005: 180) membagi fungsi pelayanan publik ke dalam bidang-bidang sebagai berikut, yaitu: pendidikan, kesehatan, keagamaan, lingkungan atau tata kota (kebersihan, sampah, penerangan), rekreasi (taman, teater, museum, turisme), sosial, perumahan, pemakaman atau krematorium, registrasi penduduk (kelahiran, kematian), air minum, legalitas atau hukum (KTP, paspor, sertifikat, dan lain-lain).

Dalam konsep pelayanan, dikenal dua jenis pelaku pelayanan, yaitu penyedia layanan dan penerima layanan. Penyedia layanan atau *service provider* (Barata, 2003) adalah pihak yang dapat memberikan suatu layanan tertentu kepada konsumen, baik berupa layanan dalam bentuk penyediaan dan penyerahan barang (*goods*) atau jasa-jasa (*services*). Penerima layanan atau *service receiver* adalah pelanggan (*customer*) atau konsumen (*consumer*) yang menerima layanan dari para penyedia layanan. Adapun berdasarkan status keterlibatannya dengan pihak yang melayani terdapat 2 (dua) golongan pelanggan, yaitu:

- a) pelanggan internal, yaitu orang-orang yang terlibat dalam proses penyediaan jasa atau proses produksi barang, sejak dari perencanaan, penciptaan jasa atau pembuatan barang, sampai dengan pemasaran barang, penjualan dan pengadministrasiannya; dan

- b) pelanggan eksternal, yaitu semua orang yang berada di luar organisasi yang menerima layanan penyerahan barang atau jasa.

Dengan demikian pelayanan tidak selalu harus dikaitkan dengan pemberian layanan langsung kepada pengguna jasa atau *front-end*, tetapi juga di dalam internal pemberi jasa itu sendiri atau *back-end*.

2.2. Konsep *E-Government*

E-Government merupakan istilah yang menurut Conrad (dalam LAN, 2001) diberikan untuk suatu pemerintahan yang mengadopsi teknologi yang berbasis internet yang dapat melengkapi dan meningkatkan program dan pelayanannya. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan sesuatu yang terbaik kepada pengguna jasa atau untuk memberikan kepuasan maksimal.

Pendapat Conrad ini selaras dengan apa yang dirumuskan oleh *World Bank*, yaitu:

E-Government berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi (seperti: *wide area network*, internet, dan komunikasi bergerak) oleh lembaga pemerintah yang mempunyai kemampuan untuk mentransformasikan hubungan Pemerintah dengan warganya, pelaku dunia usaha (bisnis), dan lembaga pemerintah lainnya. Teknologi ini dapat mempunyai tujuan yang beragam, antara lain: pemberian layanan pemerintahan yang lebih baik kepada warganya, peningkatan interaksi dengan dunia usaha dan industri, pemberdayaan masyarakat melalui akses informasi, atau manajemen pemerintahan yang lebih efisien. Hasil yang diharapkan dapat berupa pengurangan korupsi, peningkatan transparansi, peningkatan kenyamanan, penambahan pendapatan dan/atau pengurangan biaya. (www.worldbank.org)

Pada intinya *e-Government* adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara Pemerintah dan pihak-pihak lain. Penggunaan teknologi informasi ini kemudian menghasilkan hubungan bentuk baru yaitu, interaksi yang ramah, nyaman, transparan dan murah antara pemerintah dan masyarakat (*government to citizens/g2c*), pemerintah dan pelaku bisnis (*government to business enterprises/ g2b*), pemerintah dan pegawai (*governmnet to employee/g2e*), hubungan antar pemerintah (*inter agency*

relationship/g2g), dan bentuk-bentuk hubungan lainnya. Interaksi antarkomponen tersebut dapat diperhatikan pada gambar berikut.

Gambar 2.1

Interaksi Komponen dalam *e-Government*



Sumber: <http://www.netways.com>

Dari beberapa rumusan tentang *e-Government* di atas dapat dikatakan bahwa pada dasarnya *e-Government* adalah suatu interaksi dinamis antara pemerintah, kalangan swasta, kalangan akademisi, dan masyarakat umum yang diberdayakan untuk mengakses infrastruktur informasi lokal/nasional dari manapun, kapan pun, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dengan demikian jelas bahwa salah satu keunggulan *e-Government* adalah kemudahan untuk bisa diakses oleh pengguna jasa. Dengan kata lain transaksi-transaksi publik tidak dibatasi ruang dan waktu.

Secara filosofis, kegunaan dan peran *e-Government* dapat digambarkan bahwa dengan pendayagunaan teknologi informasi dalam *e-Government*, pekerjaan yang dapat diselesaikan menjadi lebih banyak, dan dalam waktu yang lebih sedikit sehingga diharapkan kepuasan konsumen akan semakin meningkat.

Hal ini tentu berbeda dengan penggunaan sarana yang pemrosesannya dilakukan secara manual.

Beberapa konsekuensi perlu diperhatikan antara lain adalah perlu dikembangkannya jabatan-jabatan struktural maupun fungsional; kelembagaan; penghargaan dan hukuman harus benar-benar diterapkan. Kualitas SDM dan standar/*reward* yang tinggi perlu diperhatikan. Demikian pula halnya dengan kualitas biaya dan operasional, yang tentunya kesemuanya menjadi tinggi. Namun demikian akan menjadi sangat *cost effective* manakala kebutuhan *user* akan informasi yang diperlukan dapat terpenuhi dengan memuaskan. dalam arti cepat, tepat, dan akurat.

Dengan demikian jelas bahwa *e-Government* merupakan pemanfaatan dan pendayagunaan teknologi komunikasi dan informasi dalam manajemen pemerintahan membawa banyak manfaat, antara lain (Wardiana, 2002):

- 1) Pelayanan servis yang lebih baik kepada masyarakat. Informasi dapat disediakan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor.
- 2) Peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum. Adanya keterbukaan (transparansi) maka diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik.
- 3) Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Dengan adanya informasi yang mencukupi, masyarakat akan belajar untuk dapat menentukan pilihannya.
- 4) Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien.
- 5) Menjadikan penyelenggaraan pemerintahan lebih bertanggung jawab (*accountable*) dan transparan kepada masyarakat.

Namun demikian, di atas semua jenis kegunaan di atas, kegunaan umum adalah bahwa *e-Government* haruslah dapat menjadi salah satu sarana upaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui jejaring informasi dan pemberian kesempatan has partisipasi rakyat dalam proses kebijakan.

2.3. Landasan Peraturan Pengembangan *E-Government*

Inisiatif bagi pengembangan *e-Government* di Indonesia telah diperkenalkan melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 6/2001 tgl. 24 April 2001 tentang Telekomunikasi, Media dan Informatika (Telematika) yang menyatakan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan teknologi telematika untuk mendukung *good governance* dan mempercepat proses demokrasi. Lebih jauh lagi, *e-Government* wajib diperkenalkan untuk tujuan yang berbeda di kantor-kantor pemerintahan. Administrasi publik adalah salah satu area di mana internet dapat digunakan untuk menyediakan akses bagi semua masyarakat yang berupa pelayanan yang mendasar dan menyederhanakan hubungan antar masyarakat dan pemerintah.

Dalam rangka menindaklanjuti upaya tersebut, pemerintah melalui presiden mengeluarkan Inpres No. 3 tahun 2003. Berdasarkan Inpres No. 3 tahun 2003, pemerintah telah menggariskan kebijakan dan strategi nasional dalam pengembangan *e-Government*. Ditegaskan bahwa tujuan pengembangan *e-Government* merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien.

Berdasarkan sifat transaksi informasi dan pelayanan publik yang disediakan oleh Pemerintah melalui jaringan informasi, pengembangan *e-Government* dapat dilaksanakan melalui 4 (empat) tingkatan sebagai berikut:

- a. Tingkat 1 - Persiapan, meliputi:
 - (a) Pembuatan situs informasi di setiap lembaga;
 - (b) Penyiapan SDM;
 - (c) Penyiapan sarana akses yang mudah misalnya menyediakan sarana *multipurpose community center*, warung internet (warnet), dan lain-lain;
 - (d) Sosialisasi situs informasi, baik untuk internal maupun untuk publik.
- b. Tingkat 2 - Pematangan, meliputi:
 - (a) Pembuatan situs informasi publik interaktif;
 - (b) Pembuatan antar muka keterhubungan dengan lembaga lain.
- c. Tingkat 3 - Pemantapan yang meliputi:

- (a) Pembuatan situs transaksi pelayanan publik;
 - (b) Pembuatan interoperabilitas aplikasi maupun data dengan lembaga lain.
- d. Tingkat 4 - Pemanfaatan yang meliputi pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat *G2G*, *G2B* dan *G2C* yang terintegrasi.

Situs pemerintah pusat dan daerah harus secara bertahap ditingkatkan menuju ke tingkat 4. Perlu dipertimbangkan bahwa semakin tinggi tingkatan situs tersebut, diperlukan dukungan sistem manajemen, proses kerja, dan transaksi informasi antar instansi yang semakin kompleks pula. Upaya untuk menaikkan tingkatan situs tanpa dukungan yang memadai, akan mengalami kegagalan yang tidak hanya menimbulkan pemborosan namun juga menghilangkan kepercayaan masyarakat.

2.4. Elemen Pengembangan *E-Government*

Berdasarkan hasil kajian dan riset dari *Harvard JFK School of Government*, elemen-elemen yang harus diperhatikan dalam rangka penerapan konsep-konsep digitalisasi pada sektor publik, yaitu:

1. *Support*. Elemen pertama dan paling krusial yang harus dimiliki oleh pemerintah adalah keinginan dari berbagai kalangan pejabat publik dan politik untuk menerapkan konsep *e-Government* dengan sungguh-sungguh, bukan hanya sekedar mengikuti tren. Lebih jauh lagi, dukungan yang diharapkan dalam beberapa bentuk disepakatinya kerangka *e-Government*, alokasi sejumlah sumber daya (manusia, finansial, tenaga, waktu, informasi), dibangunnya berbagai infrastruktur dan suprastruktur pendukung, dan sosialisasikan konsep *e-Government* secara merata, kontinu, konsisten, dan menyeluruh kepada seluruh kalangan birokrat, dan masyarakat umum.
2. *Capacity* Yang dimaksud dengan elemen ini adalah adanya unsur kemampuan atau keberdayaan dari pemerintah setempat dalam mewujudkan *e-Government* menjadi kenyataan. Ada tiga hal minimum yang harus dimiliki oleh pemerintah sehubungan elemen ini, yaitu: sumber

daya finansial, infrastruktur teknologi informasi, sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian.

3. *Value*. Inisiatif *e-Government* tidak ada gunanya jika tidak ada yang merasa diuntungkan dengan adanya implementasi konsep tersebut, yang menentukan besar tidaknya manfaat yang diperoleh dengan adanya *e-Government* bukanlah pemerintah sendiri, melainkan masyarakat. Untuk itulah maka pemerintah harus teliti dalam memilih prioritas jenis aplikasi apa saja yang perlu didahulukan agar benar-benar memberikan nilai manfaat yang dirasakan masyarakatnya.

Kesiapan menuju keberhasilan *e-Government* menurut Heeks (2001) berkaitan dengan:

1. Infrastruktur sistem data
2. Infrastruktur legal/hukum. Perlu adanya perangkat hukum untuk menangkal kejahatan digital, serta melindungi privasi, sekuriti data/informasi dan transaksi digital perorangan, perusahaan dan lembaga pemerintah.
3. Infrastruktur kelembagaan. Perlu adanya instansi khusus yang menangani *e-Government* yang memberikan layanan informasi kepada masyarakat termasuk layanan digital.
4. Infrastruktur SDM. Sistem kepegawaian perlu dapat dikembangkan agar mampu menarik SDM berkualitas profesional dalam bidang telematika untuk ikut berkiprah dalam *e-Government* milik pemerintah.
5. Infrastruktur teknologi. Meskipun teknologi yang diperlukan relatif mahal, tapi peluang kerja sama dengan swasta perlu dikembangkan dalam membangun infrastruktur teknologi untuk mendukung *e-Government*.
6. Kepemimpinan dan pemikiran. Kepemimpinan politik dengan visi yang jelas mutlak diperlukan dalam menjamin keberhasilan implementasi *e-Government*.

Terdapat lima dimensi dalam upaya mengukur performa pemerintahan yang menerapkan *e-Government* yang masing-masing dijabarkan dalam berbagai kriteria secara lebih detail. Kelima dimensi tersebut yaitu: manfaat, efisiensi, partisipasi, transparansi, dan manajemen perubahan (Stiftung, 2001)

1. Manfaat, berhubungan dengan kualitas dan kuantitas layanan yang diberikan dan bagaimana masyarakat mendapatkan manfaat dari layanan tersebut.
2. Efisiensi, berhubungan dengan bagaimana teknologi bisa mempercepat proses dan meningkatkan kualitas pelayanan.
3. Partisipasi, berhubungan dengan apakah pelayanan yang diberikan memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk memberikan partisipasi dalam penyampaian pendapat dan proses pengambilan keputusan.
4. Transparansi, menyangkut apakah pemerintah dalam hal ini mendorong keterbukaan informasi menuju proses transparansi dalam pemerintahan.
5. Manajemen perubahan, hal ini berkaitan dengan proses implementasi apakah ada proses penelaahan yang jelas dan dikelola dengan baik.

Perpaduan dari elemen-elemen di atas menjadi kunci sukses pemerintah dalam membangun *e-Government*. Dengan terbangunnya *e-Government* diharapkan pemerintahan dapat lebih efisien, dalam arti dapat lebih murah, dapat berbuat lebih banyak, dan dapat bekerja lebih cepat. Selain itu, pemerintahan diharapkan dapat lebih efektif, dalam arti dapat bekerja lebih baik dan inovatif.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Rancangan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif memiliki ciri-ciri yaitu memusatkan perhatian pada masalah-masalah aktual saat ini. Data yang telah dikumpulkan tersebut lalu disusun, dianalisis dan dijelaskan serta disimpulkan. Penelitian deskriptif merupakan penelitian non-hipotesis yang bertujuan menggambarkan keadaan atau status fenomena, di mana peneliti hanya ingin mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan keadaan sesuatu (Arikunto, 2005).

3.2. Unit Analisa dan Responden Penelitian

Unit analisa adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian. Subyek penelitian itu sendiri merupakan sumber dari mana data itu diperoleh (Arikunto, 2005). Berdasarkan pengertian ini maka yang menjadi unit analisa dalam penelitian ini institusi pemerintahan, yaitu Pemkab Banyumas.

Dalam menentukan responden penelitian ini menggunakan teknik *snow balling*. Pengambilan keputusan tentang banyaknya sumber data dilakukan atas dasar “triangulasi” (peneliti - objek - kondisi), sampai memperoleh informasi secukupnya yang relatif sama. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data dan informasi dari responden yang meliputi pejabat pemerintah daerah, anggota DPRD, dan pihak-pihak terkait di daerah diminta pandangannya melalui wawancara mendalam.

1.5.Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

1.5.1. Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap *website* resmi Pemkab Banyumas menyangkut *front office* atau *website* dan *back office* atau manajemen *e-Government*. Tahap kedua dilakukan melalui penelitian lapangan ke Kabupaten Banyumas guna melakukan wawancara secara mendalam (*in-depth interview*) kepada *stakeholders* serta pengumpulan data sekunder pendukung yang dalam penilaian. Data yang dikumpulkan dalam aspek kepemimpinan,

kelembagaan, sumber daya manusia yang dibutuhkan, infrastruktur dan aplikasi, serta alokasi anggaran.

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari 3 (tiga) sumber utama, yaitu:

- a) *Person*, subyek yang menjadi tempat bagi peneliti bertanya mengenai variabel yang akan diteliti, dalam hal ini adalah *stakeholders* yang terlibat dalam pengembangan *e-Government*.
- b) *Paper*, sumber data kertas yang menjadi tempat bagi peneliti membaca dan mempelajari sesuatu yang berhubungan dengan data penelitian. Sumber data dapat berupa *website*, arsip, pedoman, surat keputusan, dan laporan-laporan yang menyangkut tentang *e-Government*.
- c) *Place*, menunjuk pada lokasi di Kabupaten Banyumas sebagai tempat yang berhubungan dengan data penelitian.

Sedangkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

- a) Data primer, yaitu keseluruhan data hasil penelitian yang diperoleh langsung dari responden melalui wawancara.
- b) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari *website*, arsip, pedoman, surat keputusan, laporan-laporan, dan dokumen-dokumen lainnya yang berasal dari instansi yang terkait dengan penelitian ini.

1.5.2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan berbagai data dan informasi maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Wawancara

Dalam wawancara mendalam, peneliti menggunakan pedoman wawancara. Peneliti memiliki keleluasaan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada informan yang sifatnya terbuka sehingga jawaban yang dihasilkan dari wawancara tersebut tidak terbatas dalam lingkup konteks permasalahan penelitian.

b) Dokumentasi

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mempelajari dan mencatat arsip, pedoman, surat keputusan, dan laporan-laporan serta bahan-bahan lain yang berkaitan dengan pengembangan *e-Government*.

c) Observasi

Pengumpulan data diperoleh dengan mengamati situs web yang diteliti sehingga peneliti dapat melihat langsung keadaan yang sebenarnya untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas mengenai implementasi *e-Government*. Melalui observasi maka data yang diperoleh dan disajikan sesuai dengan keadaan di lapangan penelitian.

1.6. Metode Analisis Data

Penelitian ini memakai teknik analisis data kualitatif. Data yang diperoleh akan diolah dengan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu: *pertama*, membuat rencana analisis data; *kedua*, mengolah data; *ketiga*, menganalisis data; *keempat*, menafsirkan data; dan *kelima*, menyimpulkan data.

Dalam melakukan analisis, data penelitian terlebih dahulu dikumpulkan melalui pengamatan (observasi), wawancara (*interview*), dan dokumentasi. Langkah selanjutnya data diolah dan interpretasikan berdasarkan hasil pengamatan, wawancara, dan dokumentasi atau gabungan di antara ketiganya. Penarikan kesimpulan dilakukan setelah keseluruhan data yang terkumpul dinilai dan selesai ditafsirkan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

4.1.1. Kondisi Geografis Kabupaten Banyumas

Wilayah Kabupaten Banyumas terletak di sebelah Barat Daya & merupakan bagian dari Propinsi Jawa Tengah. Terletak di antara garis Bujur Timur 108 " 39' 17" sampai 109" 27' 15" & di antara garis Lintang Selatan 7" 15' 05" sampai 7" 37' 10" yang berarti berada di belahan selatan garis khatulistiwa. Batas-batas Kabupaten Banyumas adalah :

1. Sebelah Utara: Gunung Slamet, Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pemalang.
2. Sebelah Selatan: Kabupaten Cilacap
3. Sebelah Barat: Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Brebes
4. Sebelah Timur: Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Banjarnegara

Gambar 3.1
Wilayah Kabupaten Banyumas



Sumber: www.banyumaskab.go.id

Luas wilayah Kabupaten Banyumas sekitar 1.327,60 km² atau setara dengan 132.759,56 ha, dengan keadaan wilayah antara daratan & pegunungan dengan struktur pegunungan terdiri dari sebagian lembah Sungai Serayu untuk tanah pertanian, sebagian dataran tinggi untuk pemukiman & pekarangan, dan sebagian pegunungan untuk perkebunan dan hutan tropis terletak di lereng Gunung Slamet sebelah selatan. Bumi & kekayaan Kabupaten Banyumas masih tergolong potensial karena terdapat pegunungan Slamet dengan ketinggian puncak dari permukaan air laut sekitar 3.400 mdpl & masih aktif. Keadaan cuaca & iklim di Kabupaten Banyumas karena tergolong di belahan selatan khatulistiwa masih memiliki iklim tropis basah. Demikian Juga karena terletak di antara lereng pegunungan jauh dari permukaan pantai/lautan maka pengaruh angin laut tidak begitu tampak, namun dengan adanya dataran rendah yang seimbang dengan pantai selatan angin hampir nampak bersimpangan antara pegunungan dengan lembah dengan tekanan rata-rata antara 1.001 mbs, dengan suhu udara berkisar antara 21,4 derajat C - 30,9 derajat C.

4.1.2. Profil Pemerintahan Kabupaten Banyumas

Kabupaten Banyumas terdiri dari 27 kecamatan dengan jumlah kelurahan sebanyak 30 dan desa sebanyak 301. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkab Banyumas berjumlah 99 SKPD, baik badan, dinas, kantor kecamatan, dan kelurahan, namun tidak termasuk institusi DPRD dan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Visi kabupaten Banyumas adalah menyejajarkan kabupaten Banyumas dengan kabupaten lainnya yang telah maju, bahkan melebihi.

Misi Kabupaten Banyumas yaitu:

- 1) Meningkatkan pembangunan berbasis kawasan disertai peningkatan infrastruktur, pemanfaatan potensi sumber daya alam, pengelolaan lingkungan hidup secara optimal dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.
- 2) Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan benar (*Good Governance*), didukung aparatur yang bersih dan berwibawa, pelayanan prima, suasana kondusif dan demokratis, serta penegakan supremasi hukum.

- 3) Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dengan menekankan pada pengembangan investasi berbasis sektor unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
- 4) Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, berbudaya, beriman dan bertakwa sehingga mampu berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pembangunan.

4.1.3. Arah Kebijakan Bidang Informasi dan Komunikasi

Dalam RJMPD tahun 2008-2013 ditegaskan bahwa Pemkab Banyumas berupaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), didukung aparatur yang bersih dan berwibawa, pelayanan prima, suasana kondusif dan demokratis, serta penegakan supremasi hukum. Arah kebijakan bidang informasi dan komunikasi adalah sebagai berikut:

- 1) Masalah
 - a. Masih terbatasnya akses informasi publik terhadap kegiatan dan kinerja pemerintahan daerah.
 - b. Terbatasnya jaringan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi internal dan eksternal pemerintah daerah.
 - c. Masih terbatasnya kapasitas SDM yang membidangi dan menjalankan urusan komunikasi dan informasi.
- 2) Sasaran
 - a. Tersedianya layanan informasi cepat dan akurat berbasis jaringan komputer, aplikasi dan internet di lingkungan pemerintah daerah.
 - b. Meningkatnya arus komunikasi yang baik antara masyarakat yang membutuhkan informasi dan media yang memberitakan.
 - c. Meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah lewat media massa.
 - d. Meningkatnya peran serta masyarakat di dalam membangkitkan komunikasi sebagai wahana saling memberikan informasi bagi pemerintah daerah.
 - e. Meningkatnya akses informasi yang valid bagi masyarakat.

- f. Meningkatnya kreativitas dan peran serta masyarakat dalam membina lingkungan dengan peningkatan wawasan kebangsaan yang baik.
- g. Meningkatkan kapasitas SDM yang membidangi dan menjalankan urusan komunikasi dan informasi.

3) Kebijakan

- a. Peningkatan sarana prasarana jaringan dan sumber informasi daerah.
- b. Penyediaan media untuk promosi dan komunikasi.
- c. Peningkatan penyediaan dan penguasaan teknologi di bidang komputer dan jaringan.
- d. Peningkatan serta pemberdayaan yang membidangi komunikasi dan informasi.

4) Program Prioritas

- a. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
- b. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa.
- c. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi.

5) Program Pendukung

- a. Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi
- b. Program fasilitas peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
- c. Program kerja sama informasi dengan media massa.

4.2. Tingkat Penerapan *e-Government* Pemerintah Kabupaten Banyumas

Dalam era teknologi informasi saat ini, hampir semua Pemerintah Daerah telah memiliki situs web resmi, termasuk Pemkab Banyumas yang telah merintis pembuatan situs internet sejak tahun 2002. Pada tahun 2009 Pemkab Banyumas meluncurkan situs resmi Pemkab Banyumas dengan tampilan baru untuk memenuhi tuntutan kebutuhan dan dinamisasi masyarakat yang berkembang dengan cepat. Pengembangan situs ini merupakan satu upaya Pemkab untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi dan data tentang kegiatan, kebijakan dan program-program Pemkab Banyumas. Penyempurnaan data dan

informasi pada situs ini, baik yang bersifat statis maupun dinamis terus diupayakan, baik dari segi tampilan maupun isi informasinya.

Berikut ini adalah halaman muka atau beranda situs web resmi Pemkab Banyumas dengan alamat www.banyumaskab.go.id.

Gambar 4.1
Situs web resmi Pemkab Banyumas



Sumber: www.banyumaskab.go.id

Data-data yang dipublikasikan pada situs web resmi Pemkab Banyumas dapat diperhatikan pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Data-data yang Dipublikasikan Dinhubkominfo
Pemkab Banyumas

Dalam Web	Data Berbasis Web
Home	Sistem informasi keuangan
Berita Hari Ini/Terkini	Sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK)
Pengumuman	Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)
Agenda DPRD	Kantor Maya (Kantaya)
Jumlah PNS dan CPNS (semester)	
Profil, Data dan Regulasi Investasi	
Hotel dan Rumah Makan	
Peraturan Daerah	
Peraturan Bupati	
Rekomendasi Wisata	
Pelayanan Umum	
Perangkat Daerah	
Fasilitas Transportasi	
Visi dan Misi	
Data Desa dan Kelurahan	
Kota Lama Banyumas	
Kesenian Banyumas	
Banyumas Dalam Angka	
Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan	
Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin	
Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan	
Profil Bupati (5 tahunan)	
Profil Wakil Bupati (5 tahunan)	
Anggota DPRD (5 tahunan)	

Sumber: www.banyumaskab.go.id, Seksi Telematika, Pos dan Telekomunikasi tahun 2010

Dari pembahasan terhadap situs www.banyumaskab.go.id Pemkab Banyumas dapat diperoleh gambaran sebagai berikut:

a. *Brand Visualization*. Informasi yang disajikan situs secara langsung menampilkan layanan dan potensi Pemkab Banyumas, baik dalam bentuk tulisan, gambar, dan dilatarbelakangi sajian musik khas Banyumasan.

b. *Information Changes*

Tingkat perubahan bentuk informasi yang disajikan dalam situs terbagi atas:

1. Statis, terutama informasi yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama, seperti; profil daerah, sumber daya daerah, dan infrastruktur daerah.
2. Dinamis, terutama informasi yang cenderung mengalami perubahan dalam waktu yang relatif singkat, misalnya informasi kegiatan bupati dan agenda DPRD.

c. Jenis Informasi

Informasi yang muncul dalam situs www.banyumaskab.go.id dikategorikan sebagai berikut:

1. informasi umum, yaitu berupa profil singkat mengenai Pemkab Banyumas
2. informasi pariwisata, yaitu informasi mengenai *landmark* Banyumas dan gambaran umum obyek wisata beserta lokasinya;
3. informasi *event* budaya, yaitu informasi mengenai peristiwa tradisi budaya dan kesenian, maupun acara-acara seminar, pertemuan, sarasehan.
4. informasi potensi dan peluang, yaitu potensi daerah dalam bentuk sumber daya alam maupun sumber daya manusianya;
5. informasi sarana dan fasilitas pendukung, yaitu ketersediaan sarana dan fasilitas pendukung seperti transportasi, akomodasi, utilitas, komunikasi yang memadai;
6. berita, yaitu informasi kegiatan pemerintahan atau peristiwa penting dalam lingkup pemerintahan.

d. Jenis Data

Dalam situs internet terdapat tiga jenis data yang digunakan, yaitu:

1. Data teks, yaitu data dalam bentuk kalimat atau angka-angka yang menjelaskan suatu informasi tertentu;
 2. Data gambar, yaitu data dalam bentuk foto atau gambar untuk menjelaskan bentuk suatu obyek dari data tekstual;
 3. Data peta, yaitu data mengenai lokasi suatu obyek ruang.
- e. Komunikasi
- Komunikasi secara *real time* belum dapat dilakukan antara Pemkab Banyumas dengan masyarakat, karena proses pengolahan informasi di *back office* masih bersifat *off-line*.
- f. Bahasa dan Universalitas
- Bahasa yang digunakan dalam situs internet adalah bahasa Indonesia dan bahasa Jawa.
- g. Fitur-fitur khusus yang mengakomodasi prinsip-prinsip *good governance*. 1) Transparansi, terdapat *e-procurement* yaitu layanan pengadaan secara elektronik (LPSE), namun belum ditemukannya yang secara eksplisit berisi bagaimana proses *monitoring* pembuatan kebijakan daerah; 2) Akuntabilitas, masyarakat dapat mengakses ringkasan penjabaran APBD, namun belum ditemukan saluran dari masyarakat untuk mengetahui efektivitas sebuah kebijakan yang dilaksanakan pemerintah; 3) Partisipasi, sudah ada fasilitas berupa penyampaian aspirasi lewat mekanisme *email* yang disebut sebagai surat warga.

4.3. Kepemimpinan

Komitmen pimpinan baik dalam lingkungan legislatif maupun eksekutif sangat menentukan keberhasilan pengembangan dan pelaksanaan *e-Government*. Komitmen ini menyangkut pengambilan kebijakan pembangunan oleh Pemkab Banyumas dalam rangka pencapaian visi dan misi *e-Government*. Perlu pula adanya pemberian motivasi dan teladan dari unsur pimpinan dalam pemanfaatan teknologi informasi dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Banyumas.

Meskipun pengembangan *e-Government* di Pemkab Banyumas sudah dirintis mulai tahun 2002, namun belum didasari dengan adanya rencana induk

atau *master plan* mengenai bagaimana *e-Government* harus dibangun dan bagaimana penerapannya. Pada periode waktu 2002 sampai 2008 penyelenggaraan hanya berdasarkan tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) dinas dan lembaga teknis yang terkait. *Blue print* pernah disusun pada tahun 2005 namun tidak implementatif. Sehingga penerapan *e-Government* tidak mempunyai arah yang pasti dikarenakan belum adanya *roadmap* atau penahapan yang jelas dan terarah. Seiring berjalannya waktu sering terjadi perubahan struktur organisasi sehingga apa yang menjadi amanat *blue print* tersebut tidak dapat dilaksanakan.

Komitmen pimpinan Pemkab Banyumas mulai tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2008-2013 yang ditetapkan dalam Perda No. 24 Tahun 2009. Dalam RPJMD ditegaskan bahwa Pemkab Banyumas berupaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan benar (*good governance*), didukung aparatur yang bersih dan berwibawa, pelayanan prima, suasana kondusif dan demokratis, serta penegakan supremasi hukum. Urusan komunikasi dan informatika yang membidangi *e-Government* menjadi bagian penting untuk mencapai misi tersebut. Arah kebijakan yang terkait dengan urusan komunikasi dan informatika dalam RPJMD tahun 2008-2013 adalah:

- a) Peningkatan sarana prasarana jaringan dan sumber informasi daerah.
- b) Penyediaan media untuk promosi dan komunikasi.
- c) Peningkatan penyediaan dan penguasaan teknologi di bidang komputer dan jaringan.
- d) Peningkatan serta pemberdayaan yang membidangi komunikasi dan informasi.

Inpres No 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*, mengamanatkan setiap Gubernur dan Bupati/Walikota untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing guna terlaksananya pengembangan *e-Government* secara nasional. Karena itu, perlu adanya kesepakatan bersama antar institusi pemerintah (*Government to Government*) ataupun antara institusi pemerintah dengan masyarakat (*Government to Citizen*) untuk membangun kerangka *e-Government*.

Pada tahun 2009 dan 2010 Pemerintah Kabupaten Banyumas melakukan evaluasi yang kemudian tahap demi tahap mulai membangun *e-Government* di Kabupaten Banyumas, hal tersebut diawali dengan diluncurkannya kampanye Banyumas *ICT - Based Government* pada tanggal 5 Agustus 2010. Pencanangan ini menandakan bahwa pemanfaatan ICT melalui *e-Government* menjadi prioritas pembangunan daerah di Kabupaten Banyumas. Maksud dari Program “Pengembangan Banyumas : *ICT - Based Government*” ini adalah untuk menjadikan Kabupaten Banyumas sebagai Kabupaten yang dapat melaksanakan kegiatan pemerintahan yang lebih terintegrasi sehingga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, responsif, akuntabel, efektif, transparan dan efisien. Tujuannya adalah untuk membangun infrastruktur *e-Government* dalam rangka menunjang maksud program ini. Dengan meningkatkan infrastruktur yang ada, nantinya diharapkan akan mempercepat semua proses pelayanan masyarakat di Kabupaten Banyumas serta kebebasan dalam mengakses informasi bagi masyarakat.

Hasil yang diharapkan dalam Program “ Pengembangan Banyumas : *ICT - Based Government* ” ini adalah sebagai berikut :

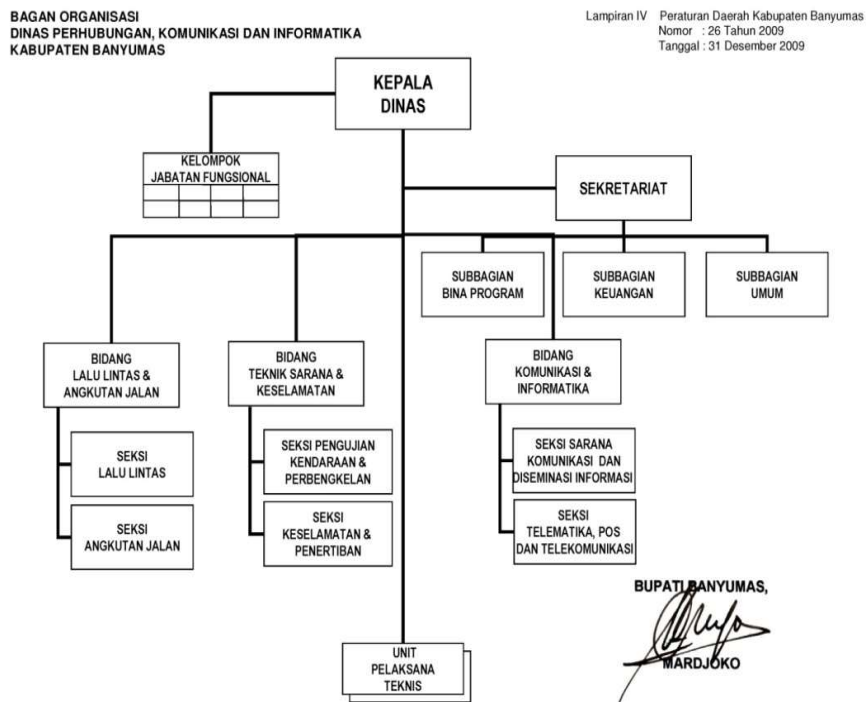
- a) Adanya Infrastruktur *e-Government* dalam menunjang percepatan proses pelayanan pemerintah dan masyarakat.
- b) Adanya satu sistem yang mampu menampung seluruh data digital hasil dari pengolahan data manual ke dalam sistem yang terintegrasi.

Produk hukum yang dikeluarkan oleh Pemkab Banyumas untuk mendukung *ICT Based Government* adalah: a) Perbup Usaha Warnet dan *GameNet*; b) Perbup Penerapan LPSE; c) dan Perbup Penerapan *eOffice*. Pada gilirannya, pelaksanaan sosialisasi konsep *ICT - Based Government* perlu dilakukan secara merata, kontinyu, konsisten dan menyeluruh kepada kalangan birokrat secara khusus dan masyarakat secara umum melalui *workshop*, seminar, lokakarya dan lain-lain. Khusus untuk para pejabat dan pengambil keputusan, mereka perlu juga mengetahui konsep dasar Sistem Informasi Manajemen (*MIS: Management Information System*).

4.4. Kelembagaan

Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Dinhubkominfo) merupakan *task force e-Government* di Kabupaten Banyumas. Dasar hukumnya adalah Perda No. 26 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas. Dinhubkominfo berdasarkan Perda No. 26/2009 mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan dan bidang komunikasi dan informatika berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Berikut ini adalah bagan organisasi Dinhubkominfo Pemkab. Banyumas

Gambar 4.2
Struktur Organisasi Dinhubkominfo Kab. Banyumas



Sumber: Lampiran Perda Kab. Banyumas No. 26/2009

Lebih lanjut Dinhabkominfo dalam menyelenggarakan tugas dalam bidang komunikasi dan informatika menjalankan fungsi sebagai berikut:

- a) perumusan kebijakan teknis lingkup perhubungan, komunikasi dan informatika;
- b) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum lingkup perhubungan, komunikasi dan informatika;
- c) pembinaan dan pelaksanaan tugas lingkup perhubungan, komunikasi dan informatika;
- d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan bagan organisasi di atas terlihat bahwa Bidang Komunikasi dan Informatika yang menangani pembangunan *e-Government* di Kabupaten Banyumas. Kepala bidang komunikasi dan informatika mengoordinasikan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan pengelolaan pelaksanaan kegiatan pengawasan, pengendalian dan penertiban kegiatan di bidang pos, telekomunikasi, telematika, sarana komunikasi dan diseminasi informasi melalui rapat, pemberian petunjuk, pengarahan dan konsultasi guna mewujudkan tata komunikasi dan informasi yang berkualitas.

Bidang Komunikasi dan Informatika membawai dua seksi, yaitu seksi sarana komunikasi dan diseminasi informasi dan seksi telematika, pos dan telekomunikasi. Kepala seksi sarana komunikasi dan diseminasi informasi memiliki tugas: menyiapkan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan kegiatan bidang sarana komunikasi dan diseminasi informasi yang mencakup penerapan, pembangunan, pengembangan, pengawasan, dan pengendalian sarana komunikasi, penyiaran dan penyebarluasan informasi melalui fasilitasi, bimtek, advokasi, sosialisasi, supervisi, konsultasi, pemberian petunjuk dan/atau cara lainnya guna memenuhi standar teknis dan ketentuan yang berlaku.

Seksi telematika, pos dan telekomunikasi adalah pelaksana teknis penerapan TI dalam pemerintahan. Kepala seksi telematika, pos dan telekomunikasi memiliki ringkasan tugas yaitu menyiapkan pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan pengelolaan kegiatan telematika, pos dan telekomunikasi yang mencakup penerapan, pembangunan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian kegiatan telematika, pos dan telekomunikasi fasilitasi, bimbingan teknis, advokasi, sosialisasi, supervisi, konsultasi, pemberian

petunjuk dan/atau cara lainnya guna mewujudkan tata kelola urusan pos dan telekomunikasi yang berkualitas.

Teknologi informasi merupakan *tools* dan *enabler* untuk penerapan *good governance* melalui penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang akuntabel, transparan dan adanya partisipasi publik yang signifikan. Untuk itu, diperlukan suatu model management dan pengelolaan *e-Government* pemerintah daerah. Idealnya manajer *e-Government* dipangku oleh eselon 1 tingkat di bawah eselon tertinggi pada organisasi struktural pemerintah daerah. Dalam pengelolaannya dilakukan oleh satu tim atau divisi tersendiri (*task force*). Hal yang cukup penting juga adalah memosisikan pengelola TI (Dinhubkominfo) sebagai penyedia sistem secara menyeluruh, bukan hanya sebatas sebagai pengelola sistem informasi dan *data base*.

4.5. Sumber Daya Manusia

Keberhasilan implementasi *e-Government* sangat ditentukan oleh kapasitas sumber daya manusia karena pada intinya *e-Government* adalah pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemanfaatan teknologi ini tentunya membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi dan keahlian dalam teknologi informasi untuk menunjang pelaksanaan *e-Government*. Semakin tinggi tingkat kompetensi dan keahlian SDM di pemerintah, semakin siap dalam menerapkan konsep *e-Government*. Tabel berikut ini menggambarkan ketersediaan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi (TI) di instansi Pemkab Banyumas.

Tabel 4.2
Ketersediaan SDM TI di Instansi Pemkab Banyumas

No	Instansi	Jumlah Pegawai yang Bisa Komputer	Penguasaan TI
1.	Dinhubkominfo	30	Operator
		2	Programmer
		4	Teknisi
2.	Dinperindagkop	30	Komputer
		1	Operator
3.	Disnakertrans	5	Operator plus
4.	Dinporabudpar	20	Operator

No	Instansi	Jumlah Pegawai yang Bisa Komputer	Penguasaan TI
5.	Dinas SDABM	45	Operator
6.	Dindukcapil	50	Operator
7.	Dinpertanhutbun	33	Operator
		1	Operator
8.	BPMPP	12	Operator plus
9.	Bapermas PKB	29	Operator
		1	Operator
10.	Disnakkan	10	Operator plus
11.	Bakesbangtibliinmas	7	Operator
12.	Dinas ESDM	28	Operator
13.	BKD	50	Operator
		3	Operator
14.	DPPKAD	1 Pejabat	Programmer
		2 Staff	Programmer
		30	Programmer
15.	DKK	20	Operator
16.	DCKKTR	32	Operator
17.	Kantor Diklat	6	Operator
18.	BLH	6	Operator
19.	Setda	80	Operator
20.	Setwan	10	Operator
21.	Kantor Perpusda	4	Operator
22.	Kantor Satpol PP	8	Operator
23.	Bapeluh	5	Operator
24.	Bappeda	40	Operator
		1	Operator
25.	Inspektorat	34	Programmer
		1	Operator
26.	RSUD Banyumas	50	Programmer
		2	Operator
27.	RSUD Ajibarang	22	Programmer
			Operator

Sumber: Hasil Survei Seksi Telematika, Pos dan Telekomunikasi tahun 2010

Untuk dapat melaksanakan program pengembangan *e-Government* dengan optimal diperlukan SDM yang menguasai kompetensi dasar bidang komputer, jaringan komputer dan internet, minimal sebagai pengguna biasa. Oleh karena itu perlu adanya pengembangan SDM di bidang teknologi informasi dan perekrutan

Calon Pegawai Negeri Sipil di daerah (CPNSD) untuk dari lulusan yang berbasis teknologi informasi. Realisasi SDM yang dibutuhkan untuk mendukung kesiapan *e-Government* dapat diperhatikan pada tabel berikut.

Tabel 4.3.
Keahlian yang Dibutuhkan dalam Kesiapan *e-Government*

No	Jenis Keahlian	Usulan	Realisasi
1	Linux Full Package	1	1
2	Web Design Full Package	1	1
3	Management IT	3	1
4	Programing	3	0
5	Introduction Networking	2	1
6	Operating System	2	1
7	Database	3	1
8	Teknisi komputer	2	0

Sumber : Seksi Telematika, Pos dan Telekomunikasi Tahun 2010

Peningkatan sumber daya manusia PNS untuk implementasi *e-Government* perlu penanganan yang serius dan dilakukan bersama oleh pemerintah, Perguruan Tinggi, dan pihak swasta. Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia di bidang teknologi informasi dan komunikasi dapat dilakukan dengan membuka seluas-luasnya akses informasi serta mendorong kepada semua pihak untuk ikut berpartisipasi dalam mengembangkan bidang ini. Memberikan inspirasi pada kalangan bisnis, industri, akademis dan masyarakat luas untuk berpartisipasi haruslah menjadi ide utama dalam program *e-Government*, karena tujuan utama dari program ini adalah untuk menyediakan pelayanan pemerintah yang lebih bagus, lebih cepat, dan lebih murah kepada masyarakat.

Di dalam pelatihan dan peningkatan SDM, perlu mengubah pandangan tentang teknologi informasi dan komunikasi; bukan sekadar alat untuk mengelola informasi, melainkan ia memiliki aspek budaya. Teknologi bukan hanya menuntut penguasaan atas perangkat kerasnya, melainkan mengubah diri kita berinteraksi dengan masyarakat melalui teknologi informasi dan komunikasi. untuk tahun 2011 Pemerintah Kabupaten Banyumas mendapatkan 17 formasi tenaga teknologi informasi untuk menyiapkan SDM menuju Banyumas *ICT - Based Government*.

4.6. Infrastruktur dan Sistem Aplikasi

4.6.1. Ketersediaan Infrastruktur

Ketersediaan unit komputer, infrastruktur komunikasi data, dan jaringan komputer merupakan *pre-requisite*, mengingat aplikasi *e-Government* memang hanya bisa berfungsi optimal jika infrastruktur tersebut sudah tersedia. Tabel di bawah menggambarkan ketersediaan unit komputer tiap instansi di Kabupaten Banyumas.

Tabel 4.4
Komputer di Setiap Instansi Kabupaten Banyumas

No	Instansi	Sumber Pembiayaan	Jumlah
1	Dinhubkominfo	APBD dan Hibah	32
2	Dinperindagkop	APBD Dan 1 APBD Prop.	14
3	Disnakertrans	APBD	10
4	Dinporabudpar	APBD	10
5	Dinas SDABM	APBD	15
6	Dindukcapil	APBD	25
7	Dinpertanhutbun	2 Bantuan pst dan APBD	21
8	BPMPP	APBD	15
9	Bapermas PKB	APBD	27
10	Disnakkan	APBD	15
11	Bakesbangtibliinmas	APBD	8
12	Dinas ESDM	APBD	15
13	BKD	APBD	23
14	DPPKAD	APBD	30
15	DKK	APBD	14
16	DCKKTR	APBD	18
17	Kantor Diklat	APBD	6
18	Badan Lingkungan Hidup	APBD	5
19	Setda	5 Inpres + APBD	27
20	Setwan	APBD	12
21	Kantor Perpusda	APBD	10
22	Kantor Satpol PP	APBD	8
23	Bapeluh	APBD	5
24	Bappeda	APBD	20
25	Inspektorat	APBD	18
26	RSUD Banyumas	APBD	24
27	RSUD Ajibarang	APBD	12

Sumber: Seksi Telematika, Pos dan Telekomunikasi tahun 2010

Server yang handal dibutuhkan untuk mendukung komunikasi data dalam jaringan komputer. Kondisi saat ini tersedia 5 unit *server* yang dikelola oleh Dinhubkominfo. Tabel berikut menggambarkan kuantitas *server* dan peralatan pendukung yang dimiliki Dinhubkominfo.

Tabel 4.5
Komputer Server dan Peralatan Pendukung Yang Dimiliki
Dinhubkominfo Kabupaten Banyumas

No	Jenis	Jumlah (unit)
1	Unit Server	
	a. Server <i>BuiltUp Processor Pentium Xeon</i>	4
	b. Server Rakitan <i>Processor Pentium Xeon</i>	1
2	Peralatan Pendukung	
	a. <i>Mikrotik</i>	3
	b. <i>Router</i>	1
	c. <i>Swith Hub</i>	5
	d. Modem Internet	1
	e. UPS	4
	f. Rak Server	1

Sumber : Seksi Telematika, Pos dan Telekomunikasi tahun 2010.

Seperti diketahui *e-Government* diimplementasi melalui 3 konsep skenario, yaitu *Government to Government (G2G)*, *Government to Business (G2B)* dan *Government to Citizen (G2C)*. Untuk mendapatkan tujuan sesuai dengan yang diharapkan, maka keterlibatan unit bisnis diperlukan dalam pengembangan *e-Government*. Kabupaten Banyumas sudah bekerja sama dengan pihak PT. Telkom Indonesia, Tbk. untuk menangani koneksi jaringan internet dengan menggunakan teknologi ADSL (*Asymetric Digital Subscribe Line*) dan FO (*Fiber Optic*) di Seluruh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kabupaten Banyumas yang meliputi 26 Dinas/Lemtekda, 27 Kecamatan dan 30 Kelurahan.

Data secara lengkap yang berisi daftar penyelenggara jasa telekomunikasi dan daftar produk yang beroperasi di Kabupaten Banyumas dapat diperhatikan pada bagian tabel berikut ini.

Tabel 4.6
Daftar Penyelenggara Jasa Telekomunikasi dan Daftar Produk
Beroperasi di Kabupaten Banyumas Tahun 2008

No	Penyelenggara Jasa Telekom.	Produk	Tipe Jaringan	Ket.
I	Jaringan Kabel			
1	Telkom	Telepon Kabel	Kabel	
		Speedy, Telkomnet Instan	Internet Kabel	
II	Jaringan Nirkabel			
1	Telkom	Flexi Classy, Flexi Trendy	CDMA	
2	Telkomsel	Simpati, Kartu Hallo, Kartu As	GSM	
3	Indosat	Indosat 3,5G Broadband	Mobile Internet	
		Mentari, Matrix, Matrix Auto, IM3	GSM	
		Starone	CDMA	
4	Pro XL	Bebas, Jempol, XL, Jimat	GSM	
5	Sampoerna Telekom	Ceria	CDMA	
6	Natrindo Telepon Seluler	AXIS	GSM	
		Solusi	CDMA	
7	Smart Telecom	Smart	CDMA	
8	Mobile-8	Fren	GSM	
9	Hutchison Charoe Pokhand Telecom (HCPT)	Tree / 3	GSM	
10	Bakrie Telecom	Esia	CDMA	

Sumber : Dinhubkominfo Kabupaten Banyumas, Data Sarana Komunikasi,
Pos dan Telekomunikasi Kabupaten Banyumas 2008

Dengan pengembangan Banyumas : *ICT - Based Government* diharapkan adanya Infrastruktur *e-Government* dalam menunjang percepatan proses pelayanan pemerintah dan masyarakat. Adanya satu sistem yang mampu menampung seluruh data digital hasil dari pengolahan data manual ke dalam

sistem yang terintegrasi. Penyusunan *Cell Plan*, Pemanfaatan Menara Bersama dan Pembuatan Aplikasinya (2011 – 2012).

4.6.2. Sistem Aplikasi *e-Government*

Hampir semua Dinas dan Lembaga Teknis Daerah (Lemtekda) di Kabupaten Banyumas telah memiliki aplikasi yang membantu kinerja di unit kerja masing-masing, akan tetapi aplikasi tersebut terkadang tidak mewakili dari sisi pekerjaan administrasi antar bidang di setiap SKPD, sehingga tidak menjadikan terjadinya integrasi data. Nama Aplikasi, jumlah dan jenis sistem aplikasi *e-Government* cukup beragam, sesuai dengan fungsi yang akan dilaksanakannya. Sebaran data *software* yang digunakan dapat diperhatikan pada tabel berikut.

Tabel 4.7
Data *Software* di Pemerintah Kabupaten Banyumas

No	Unit Kerja yang Bertanggung jawab	Nama Aplikasi/ <i>Software</i>
1	Sekretariat Daerah	a. SIM Analisis Harga Satuan Pekerjaan b. SIM Realisasi Anggaran kegiatan c. SIM Administrasi Surat d. SIM Administrasi Kepegawaian e. SIM Indek Harga Standard
2	Dinhubkominfo	c. SIM Kantaya/ <i>E-Office</i> d. SIM LPSE e. SIM Uji Kendaraan f. SIM Angkutan
3	Dinsosnakertrans	SIM Tenaga Kerja
4	Dinnakan	a. SIM Stat SB Pembesaran b. SIM Stat Peternakan
5	Dinas Kesehatan	SIM Puskesmas
6	DPPKAD	a. SIMDA b. SIM Aset Daerah c. SIM Pencetakan Gaji PNS
7	Dinas ESDM	a. SIM Air Tanah b. SIM Bahan Galian Gol. C
8	Dinas SDABM	a. SIM Sumber Daya Air b. SIM Ruas Jalan dan Jembatan

No	Unit Kerja yang Bertanggung jawab	Nama Aplikasi/ <i>Software</i>
9	Dindukcapil	SIAK
10	Dinperindagkop & UKM	SIM Koperasi dan UKM
11	Dinpertanbunhut	a. SIM Pertanian b. SIM Kehutanan
12	Dinas Pendidikan	a. SIM NUPTK b. SIM Pendataan Guru
13	Inspektorat	a. SIM Hasil Pemeriksaan Kabupaten b. SIM Hasil Pemeriksaan Provinsi c. SIWASDANAS
14	Bappeda	a. SIM Data Spasial b. SIM Identifikasi Infrastruktur Pengembangan Wilayah c. SIM PNPM d. SIM Sumber Daya Alam Wilayah
15	BKD	a. SIM Kepegawaian b. SIM Administrasi Pelayanan Kepagawaian
16	BPMPP	SIM Pelayanan Perijinan
17	RSUD Banyumas/Ajibarang	SIM Rumah Sakit
18	Bapermas PKB	a. SIM Posyandu b. SIM Pedesaan c. SIM PLKB
19	Kantor Perpustakaan & Arsip Daerah	SIM Perpustakaan

Sumber: Seksi Telematika, Pos dan Telekomunikasi tahun 2010

Di sisi lain, kadang kala para mitra pengembang menawarkan sistem aplikasi yang sebetulnya sudah mencakup beberapa fungsi yang dikemas dalam satu paket aplikasi. Contohnya Sistem Aplikasi Keuangan yang banyak dan mudah didapatkan di pasaran, sudah berisi beberapa modul aplikasi dengan fungsi keuangan seperti: Pengelolaan Anggaran, Sistem Kas dan Perbendaharaan, dan Sistem Akuntansi Daerah. Oleh karena itu, untuk mempermudah pemahaman terhadap Sistem Aplikasi apa yang perlu dibangun atau yang sudah ada di

pasaran, maka perlu dibuatkan peta (*mapping*) *Document Logic* aplikasi berdasarkan kategorisasi fungsi aplikasi dan juga sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) unit organisasi pemakainya. Peta aplikasi ini sangat membantu dan memudahkan Pemerintah Daerah untuk secara cepat mengidentifikasi aplikasi apa saja yang dibutuhkan, dan di unit organisasi mana aplikasi tersebut sebaiknya di pasang.

Karena sistem aplikasi *e-Government* jumlah dan jenisnya cukup beragam, di sisi lain karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan pembangunan *e-Government*, Oleh karena itu diperlukan pengelompokan aplikasi berdasarkan fungsi layanan aplikasi tersebut, apakah langsung memberikan pelayanan kepada pengguna (*front office*) atau aplikasi yang bersifat khusus atau aplikasi dasar (*back office*). Kategorisasi aplikasi yang disampaikan di sini tidak bersifat kaku, tetapi lebih kepada upaya untuk memudahkan Pemerintah Daerah dalam mengidentifikasi, memilah dan memilih aplikasi sesuai dengan lingkup fungsi dan tujuannya. Menganalisis sistem aplikasi yang ada, apakah dapat berfungsi di infrastruktur yang saat ini sudah ada, atau perlu melakukan perbaikan (*upgrading*) atau bahkan pengadaan infrastruktur baru. Dalam suatu sistem dengan fungsi pelayanan menerapkan fungsi *front office* dan *back office*. Pemkab Banyumas perlu menyusun rencana pembangunan *e-Government* dalam beberapa tahapan pembangunan yang komprehensif, realistis dan terukur. Selanjutnya Pemkab Banyumas perlu menyusun strategi pentahapan dan menentukan prioritas pembangunan di setiap tahapan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

4.7. Alokasi Anggaran

Berdasarkan rekapitulasi APBD Pemkab Banyumas bidang administrasi umum pemerintahan pada tahun 2010 diketahui alokasi anggaran Dinhubkominfo sebesar Rp. 3.669.500.000. Dibandingkan dengan total APBD yang berjumlah Rp. 345.843.326.523 maka proporsi anggaran belanja yang dikelola oleh Dinhubkominfo sebesar 1,06%. Jumlah terbesar anggaran diperuntukkan bidang kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan umum. Rekapitulasi APBD Pemkab Banyumas secara lebih lengkap dapat diperhatikan pada tabel berikut.

Tabel 4.8
Rekapitulasi APBD Bidang Administrasi Umum Pemerintahan

No	Bidang dan Unit Organisasi	Jumlah Belanja (Rp.)
1	DPRD dan Sekretariat DPRD	10.524.762.791
2	Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretariat Daerah	12.361.851.683
3	DPPKAD	28.588.054.361
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.865.416.300
5	Inspektorat	1.787.000.000
6	Badan Kepegawaian Daerah	2.802.336.950
7	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	2.007.695.000
8	Badan Lingkungan Hidup	1.317.260.000
9	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB	2.898.088.063
10	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan	950.152.000
11	Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan	941.220.000
12	Kantor pendidikan dan Pelatihan	3.658.083.900
13	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	320.405.000
14	Kantor Satuan Polisi PP	1.097.432.000
15	Dinas Pendidikan	67.781.817.500
16	Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang	30.617.951.445
17	Dinas Kesehatan	14.995.482.642
18	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	26.042.230.000
19	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	3.669.500.000
20	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.948.967.400
21	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.933.455.350
22	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	3.082.580.000
23	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata	3.152.790.000
24	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan	8.806.916.193
25	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	3.526.711.000
26	Dinas Peternakan dan Perikanan	1.544.111.500
27	RSUD Banyumas	87.999.410.709
28	RSUD Ajibarang	12.005.000.000

No	Bidang dan Unit Organisasi	Jumlah Belanja (Rp.)
29	Kecamatan	3.459.382.663
30	Kelurahan	3.157.262.073
Jumlah		345.843.326.523

Sumber : DPPKAD Kabupaten Banyumas Tahun 2010

Lebih detail lagi, dari total anggaran belanja sebesar Rp. 3.669.500.000 yang dikelola oleh Dinhubkominfo sebanyak 13,97% diantaranya dialokasikan untuk pembangunan *e-Government*. Anggaran tersebut digunakan untuk penataan sarana komunikasi, postel dan pemetaan *tower* terpadu; pengembangan *e-Government*; Sewa *bandwith*; dan pemeliharaan jaringan internet dan intranet *web hosting* dan *updating data website*. Sebagaimana terlihat rincian anggaran pada tabel berikut ini.

Tabel 4.9
Rincian Anggaran Pembangunan di Dinhubkominfo
Kabupaten Banyumas

No	Nama Kegiatan	Jumlah Dana (Rp.)
1	Ketatausahaan	1.354.039.000
2	Operasional pengujian kendaraan bermotor	50.000.000
3	Fasilitas perlengkapan jalan	560.000.000
4	Operasional terminal bus Ajibarang dan Wangon	32.496.000
5	Operasional terminal bus Purwokerto	700.000.000
6	Operasional pengendalian parkir	40.465.000
7	PAM terpadu	125.000.000
8	Pemantauan, perawatan dan perbaikan fasilitas perlengkapan jalan	230.000.000
9	Fasilitasi kegiatan lelang/tender zona retribusi parkir	65.000.000
10	Penataan sarana komunikasi, postel dan pemetaan tower terpadu	50.000.000
11	Pengembangan <i>e-Government</i>	350.000.000
12	Sewa <i>bandwith</i>	25.000.000
13	Pemeliharaan jaringan internet dan intranet <i>web hosting</i> dan <i>updating data website</i>	87.500.000
Jumlah		3.669.500.000

Sumber: Sub Bagian Keuangan Dinhubkominfo Tahun 2010

Dengan memperhatikan tabel di atas terlihat masih kecilnya alokasi anggaran Pemkab Banyumas untuk pembangunan *e-Government*. Meskipun demikian Pemkab Banyumas memiliki komitmen dalam pembangunan *e-Government* di daerah. Hal ini terlihat dengan adanya penambahan alokasi finansial pengembangan teknologi informasi setiap tahun.

BAB V

KESIMPULAN & SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa secara umum implementasi *e-Government* di situs web Pemkab Banyumas berada pada tahap kedua, yaitu interaksi. Hal ini ditandai dengan adanya situs web Pemkab Banyumas yang di dalamnya terdapat informasi dan adanya buku tamu yang dapat dijadikan sarana komunikasi masyarakat. Memang belum bersifat *live chat*, namun hal ini menunjukkan bahwa ada komitmen dari Pemkab Banyumas untuk membuka ruang komunikasi. Dari segi kuantitas informasi, *website* yang ada belum dapat menyampaikan informasi yang komprehensif dari setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemkab Banyumas. Informasi yang tersedia hanya bersifat *common informations* yang belum menyentuh pada kebutuhan layanan masyarakat. Hal ini terjadi karena kurangnya kontribusi informasi yang signifikan dari setiap SKPD.

Secara khusus, aspek-aspek yang mempengaruhi implementasi *e-Government* di Pemkab Banyumas adalah sebagai berikut.

- a) Kepemimpinan. Dinas-dinas belum membuat kesepakatan dalam mengembangkan *frame work* pengembangan *e-Government* yang sama, meskipun pada level puncak pimpinan sudah berkomitmen dalam mengembangkan *e-Government* di Kabupaten Banyumas.
- b) SDM. Jumlah dan kualitas SDM masih belum memenuhi kebutuhan.
- c) Infrastruktur dan sistem aplikasi. Pemenuhan sarana dan prasarana masih kurang. Hal ini dapat dilihat dari *bandwidth* masih rendah dan koneksi LAN belum terjalin di antara dinas-dinas.
- d) Adanya keterbatasan anggaran.

5.2 Saran

Untuk dapat mengembangkan *e Government*, maka ada beberapa unsur yang harus diperhatikan oleh Pemkab Banyumas. Unsur-unsur tersebut adalah

- a. Pemimpin Pemkab Banyumas harus segera membuat *blue print* atau kebijakan yang khusus mengatur pengembangan *e-Government*.

Pemerintah Daerah perlu menyusun strategi pertahanan dan menentukan prioritas pembangunan di setiap tahapan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

- b. Pemkab Banyumas harus berupaya meningkatkan SDM baik dari segi kuantitas dan kualitasnya.
- c. Pemkab Banyumas harus mengupayakan pemenuhan infrastruktur, yang meliputi pemenuhan sarana pendukung, pengimplementasian aplikasi berupa *e-office*, SIAK, Simkeu, *e-procurement*.
- d. Pemenuhan kebutuhan anggaran untuk pengembangan *e-Government* sesuai dengan kebutuhan.

5.3. Rekomendasi

Materi pengembangan *e-Government* perlu diperdalam dengan teori dan konsep yang relevan dengan disertai contoh dan perkembangan yang terjadi khususnya untuk pengembangan BMP IPEM4111 Pengantar Ilmu Pemerintahan dan ADPU4442 Sistem Informasi Manajemen pada Jurusan Ilmu Administrasi FISIP-UT.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsini. 2005. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Barata ,Atep Adya. 2003. *Dasar-dasar Pelayanan Prima*. Jakarta : Gramedia.
- Djaenuri, Aries. 1995. *Manajemen Pelayanan Umum*. Jakarta: IIP Press.
- Heeks, Richard. 2001. *Building e-Governance for Development: A Framework for National and Donor Action*. i-Government Working Paper Series, Paper No. 12, Institute for Development Policy and Management, University of Manchester, Manchester, UK (http://www.man.ac.uk/idpm/idpm_dp.htm#ig).
- LAN RI. 2003. *Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (Buku I)*. Jakarta: LAN RI.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernology: Ilmu Pemerintahan Baru*. Jilid 2. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurcholis, Hanif. 2005. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Grasindo, Jakarta.
- Stiftung, Bertelsmann, Booz-Allen-Hamilton. 2001. *Balanzed E-Governmnet*. US: Bertelsmann Foundation Publivation Houe.
- Wardiana, Wawan, “*Perkembangan teknologi Informasi di Indonesia*”, Makalah pada Seminar dan Pameran Teknologi Informasi 2002, Fakultas Teknik Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM) Jurusan Teknik Informatika, tanggal 9 Juli 2002.

Internet

- The World Bank Group, *E-Government Definition*, <http://www.worldbank.org/publicsektor/egov/definition.htm>.
- Website Resmi Pemerintah Kabupaten Banyumas <http://www.banyumaskab.go.id>

Peraturan Perundangan

- UU. No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Inpres No. 6/2001 tentang Telekomunikasi, Media, dan Informatika.

Inpres No. 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*.

Perda Kabupaten Banyumas No. 26 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas.

Perda Kabupaten Banyumas No. 24 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008-2013.

Peraturan Bupati Banyumas No. 16 tahun 2010 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas.